

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Padatahun 1978, sejumlah Negara Eropa melakukan kesepakatan di Den Haag untuk mengoreksi apakah kondisi tenaga kerja di kapal sesuai dengan aturan ILO. Setelah *Amoco Cadiz* tenggelam tahun itu, ditetapkanlah regulasi mengenai keamanan dan polusi pada kapal. Untuk itu, di tahun 1982 Nota Kesepahaman di Paris (*Paris MoU*) di sepakati dengan membangun Pengendalian Negara Pelabuhan (*Port State*) yang terdiri dari 26 negara Eropa dan Kanada. Dalam prakteknya, ini merupakan reaksi pada kegagalan Negara bendera (*Flag State*) terutama *flags of convenience* yang telah di delegasikan untuk klasifikasi masyarakat serta memenuhi tugas-tugas inspeksi.

Begitu pula di Indonesia bukan menjadi hal baru lagi apabila perihal keselamatan selalu menjadi sorotan dan menjadi bahan evaluasi dari berbagai Negara, khususnya di dunia maritim. Pengaruh sistem keselamatan pada kapal bergantung pada survei dan inspeksi secara berkala dan optimal yang dilakukan oleh *class*, *owner surveyor* dan *port state control* pada setiap negara yang memiliki pelabuhan maupun yang menjadi tujuan perdagangan internasional.

Port State Control (PSC) mulai terbentuk karena timbul kesadaran dari suatu negara untuk melindungi daerah dari negara tersebut, khususnya sektor maritim dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kapal-kapal lokal maupun kapal-kapal asing yang datang ke negara tersebut. Hal tersebut dilatar belakangi karena banyaknya kegagalan tugas yang dilakukan oleh *Flag State* untuk selalu mengawasi dan menjamin kelaiklautan kapal yang berbendera negara tersebut.

Pada awalnya, *PSC* dimaksudkan sebagai cadangan dari keterbatasan *Flag State* dalam mengawasi kapal-kapal yang berbendera Negara tersebut. Namun, adanya *PSC* telah menunjukkan hal yang positif terkait dengan pengawasan kapal-kapal dibawah standar, terutama jika diselenggarakan

secara regional. Tanggung jawab utama untuk standar kapal dimiliki oleh *Flag State*, namun kontrol Negara pelabuhan menyediakan “jaring pengaman” untuk menangkap kapal yang dibawah standar.

IMO telah mendorong pembentukan organisasi regional pada beberapa Negara pelabuhan untuk menyusun perjanjian-perjanjian maritim. Hal tersebut memicu munculnya perjanjian / *MoU (Memorandum of Understanding)* dari beberapa Negara yang bersangkutan, sebagai contohnya adalah *Paris MoU* (daerah Eropa dan Atlantik Utara), *Tokyo MoU* (daerah Asia dan Pasifik), dll. IMO telah mendorong pembentukan organisasi regional pada beberapa Negara pelabuhan untuk menyusun perjanjian-perjanjian maritim. Hal tersebut memicu munculnya perjanjian / *MoU (Memorandum of Understanding)* dari beberapa Negara yang bersangkutan, sebagai contohnya adalah *Paris MoU* (daerah Eropa dan Atlantik Utara), *Tokyo MoU* (daerah Asia dan Pasifik), dll. Seperti yang penulis alami pada saat melaksanakan praktek darat di Kantor UPP Kelas II Pekalongan dan mengingat pentingnya mengetahui tugas dari *Port State Control (PSC)* dan prosedur pemeriksaan kapal ikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

”OPTIMALISASI PERAN *PORT STATE CONTROL OFFICER (PSCO)* DALAM PENGAWASAN KAPAL IKAN DI PELABUHAN PEKALONGAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tugas *Port State Control (PSC)* Kantor UPP Kelas II untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kelaiklautan kapal pada kapal ikan ?
2. Apakah *Port State Control (PSC)* berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan kapal ikan di pelabuhan Pekalongan ?

3. Bagaimana prosedur pemeriksaan *Port State Control (PSC)* pada kapal ikan yang akan sandar di pelabuhan Pekalongan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas *Port State Control (PSC)* Kantor UPP Kelas II dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kelaiklautan kapal pada kapal ikan.
2. Untuk mengetahui apakah *Port State Control (PSC)* berfungsi secara optimal dalam melakukan pengawasan kapal ikan di pelabuhan Pekalongan.
3. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan *Port State Control (PSC)* pada kapal ikan yang akan sandar di pelabuhan Pekalongan.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mempunyai beberapa kegunaan penulisan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Akademi

Bagi akademi hasil penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk agar menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar handal dan terampil sehingga dapat bersaing dalam duniakerja.

2. Kantor UPP Kelas II Pekalongan

Bagi Kantor UPP Kelas II Pekalongan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau *input* sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang tentang prosedur pemeriksaan kapal ikan di Pelabuhan Pekalongan.

3. Penulis

Bagi penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah di peroleh sebelumnya dan di kaitkan dengan permasalahan yang ada.

4. Bagi Civitas Akademika :

Penulisan karya tulis ilmiah ini di harapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan informasi bagi taruna serta menambah bahan referensi di perpustakaan STIMART-"AMNI".

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Karya Tulis ini di bagi dalam 5 bab, yaitu :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membuat tinjauan pustaka, yaitu penulis meninjau kembali hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dalam karya tulis ini penulis mengartikan, dan menjelaskan kata-kata inti dalam karya ini.

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang: gambaran umum, visi dan misi, sejarah organisasi penelitian dan struktur organisasi.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian dan pembahasan masalah *OPTIMALISASI PERAN PORT STATE CONTROL OFFICER (PSCO) DALAM PENGAWASAN KAPAL IKAN DI PELABUHAN PEKALONGAN*

BAB 5. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang di analisa dari pembahasan masalah yang terjadi pada BAB IV.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan media online yang dipakai oleh penulis untuk menyusun karya tulis ilmiah.